

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi masyarakat saat ini sejak mewabahnya *Covid-19* dengan membawa dampak sosial dengan tata sosial masyarakat dengan budayanya yang sangat luar biasa diobrak abrik dengan virus ini. Berbagai hal yang dapat dibatasi secara penghentian sementara aktifitas ditempat fasilitas umum dan dibatasi. Banyaknya tempat ibadah ditutup, proses bekerja dibatasi dan diganti dengan *work for home* serta sekolah ditutup sehingga siswa belajar dari rumah (Daming, et al., 2021).

Pandemi *Covid-19* yang terjadi diseluruh penjuru dunia termasuk juga melanda Indonesia memberikan dampak pada sektor ekonomi, sosial, kesehatan, termasuk politik. Kasus tersebut menjadi salah satu krisis terbesar dalam kehidupan manusia, kondisi ini menuntut setiap elemen masyarakat, pemerintah, dan elit politik untuk bersinergi dalam mengatasi kompleksitas implikasi yang ditimbulkannya. Pertanggal 24 Juli 2021, tercatat ada 3.127.826 kasus positif di Indonesia¹. Kenaikan angka kasus *Covid-19*, selain dilaporkan dengan status positif, juga diiringi dengan angka kematian pasien yang terpapar *Covid-19* yaitu berjumlah 1.566 jiwa tertanggal 23 Juli 2021, yang sebelumnya tercatat 1.449 jiwa yang meninggal dunia akibat *Covid-19* tertanggal 22 Juli 2021².

¹ <https://covid19.go.id/berita/data-vaksinasi-covid-19-update-24-juli-2021> (diakses 24 Juli 2021).

² <https://nasional.kompas.com/read/2021/07/23/16403941/update-indonesia-catat-angka-kematian-covid-19-tertinggi-bertambah-1566> (diakses 24 Juli 2021).

Dengan demikian, layaknya menjadi peran negara, pemerintah segera mengambil tindakan untuk mengatasi penyebaran *Covid-19* di Indonesia yang bertujuan menekan angka penyebaran dan angka kematian yang disebabkan oleh *Covid-19*. Berbagai produk kebijakan yang mengatur tentang penanganan *Covid-19* turut mewarnai kondisi Indonesia saat ini. Mulai dari sosialisasi tentang virus *Covid-19*, penangannya seperti kewajiban memakai masker, menghindari kerumunan, mencuci tangan, dan berbagai protokol kesehatan yang tekankan oleh WHO (*World Health Organization*).

Adapun kaitannya dengan kebijakan pemerintah nasional tidak bisa lepas dari struktur kelembagaan negara, yang akan berkaitan satu dengan yang lain dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan. Penggunaan wewenang tersebut diperlukan terutama setelah berkembangnya wabah *Covid-19*. Pelaksanaan wewenang pemerintah dalam bentuk kebijakan-kebijakan tersebut tentunya juga harus disertai pertimbangan mengenai langkah dan akibat yang mungkin timbul. Diharapkan kebijakan yang diambil dapat dilaksanakan dengan langkah-langkah yang terukur dan dengan akibat yang dikehendaki yaitu mencegah penyebaran *Covid-19* di Indonesia. Negara Republik Indonesia melalui Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 menjelaskan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga Kebijakan ini mengamanatkan bahwa dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip

non diskriminatif, partisipasi, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional.

Menurut Ramdani dalam jurnal (Desrinelti, et al., 2021) Pelaksanaan kebijakan dapat dimaknai sebagai sebuah proses dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Dalam setiap pelaksanaannya kebijakan mempunyai luaran yang berupa aktivitas, aksi, tindakan dan mekanisme yang dibingkai menjadi suatu sistem. Menurut pendapat Afandi dan Warijo dalam jurnal (Desrinelti, et al., 2021) menjelaskan pelaksanaan dalam kebijakan yang juga dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas yang terencana dan dilakukan dengan bersungguh-sungguh yang dilandasi dengan berbagai acuan norma yang dapat disesuaikan dengan pencapaian dalam tujuan pembelajaran yang dapat disepakati.

Melalui berbagai macam strategi terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik; terutama yang berhubungan dengan masyarakat, terdapat peran-peran yang berkaitan pada infrastruktur politik yang merupakan satu kesinambungan dengan suprastruktur politik. Infrastruktur politik yang di dalamnya terdapat jurnalis atau pers sebagai infrastruktur politik memiliki peran penting dalam aspek kebijakan dan politik yang dikeluarkan oleh suprastruktur politik yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jurnalis atau pers merupakan sebuah media yang juga memiliki peran yang sangat besar. Peran media sebagai sarana komunikasi massa dalam kemajuan teknologi informasi dan internet dewasa ini sangat penting bagi interaksi dan komunikasi antar masyarakat. Seiring dengan tersedianya perangkat komunikasi yang tumbuh dengan pesat menyebabkan

masyarakat sangat mudah mengetahui bagaimana perkembangan daerahnya hingga perkembangan dunia. Hal ini menyebabkan setiap peristiwa yang terjadi di suatu wilayah dapat diketahui secara luas dan menjadi bahan diskusi yang penting dan menarik terutama terkait dengan persoalan pelayanan publik, pembangunan, sosial politik dan kebijakan-kebijakan pemerintah.

Tingkat kebutuhan informasi akan meningkat jika informasi memberikan sesuatu yang bermanfaat pada yang membutuhkan informasi tersebut, seperti menyelesaikan masalah atau memecahkan persoalan, memberikan ide-ide baru untuk sebuah program baru, kebutuhan pada pengetahuan, atau melakukan pengawasan pada sesuatu yang sedang berjalan. Kemampuan penyelenggara pemerintahan menyiapkan sediaan informasi dengan berbagai infrastruktur dan konten yang memadai, disertai dengan sikap keterbukaan dan mekanisme serta prosedur yang memadai, akan memudahkan masyarakat dapat memberikan kontribusi ataupun partisipasi secara positif.

Dengan media publik yang sangat mudah diakses oleh masyarakat seperti televisi yang merupakan salah satu media yang sangat familiar menjadi pengiring sejarah beriringan dengan para jurnalis dari tahun orde baru hingga saat ini yang dapat merekam sejarah perpolitikan Indonesia. Televisi sampai saat ini sangat mudah diakses oleh masyarakat untuk mendapatkan berita maupun informasi yang disampaikan melalui televisi.

Media massa di Indonesia yang masih memiliki kekuatan salah satunya adalah media televisi. Namun dengan pesatnya teknologi kini muncul media baru yakni media sosial yang kian hari tak kalah memberikan dampak pada kehidupan

masyarakat termasuk politik, namun televisi terlihat tetap berusaha melakukan inovasi dan strategi, upaya menghadirkan tayangan televisi melalui jaringan internet sehingga mempermudah dan mempercepat akses informasi, menyajikan tayang hiburan yang kreatif dan berusaha memberikan informasi akurat terpercaya. Keberadaan televisi di Indonesia diperkuat atas hasil riset yang dilakukan lembaga oleh riset pemasaran MARS di tahun 2000. Riset tersebut menyebutkan bahwa durasi yang habiskan oleh masyarakat dewasa di Indonesia menonton suatu tayangan televisi yakni berkisar 4 jam sehari. Durasi ini tergolong pada kategori penonton kelas berat.

Kota Tasikmalaya memiliki media televisi yang cukup populer oleh masyarakat, yaitu Radar Tv Tasikmalaya, yang merupakan perusahaan di bawah bendera group Jawa Pos. Tidak hanya Radar TV Tasikmalaya dua televisi lokal yang pernah eksis yakni Tazz TV dan MGI TV. Namun seiring perkembangan zaman dua televisi lokal tersebut tidak bisa bertahan dan menghilang. Kini Televisi yang bertahan hanya Radar TV Tasikmalaya, media televisi Radar Tasikmalaya menjalankan fungsinya sebagai stasiun lokal melalui beberapa program yang disiarkannya, seperti program talkshow politik yang kini juga membahas tentang sosialisasi melawan virus *Covid-19* seperti iklan mencuci tangan, memakai masker, dan lainnya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kerjasama antara Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya dengan Radar Tv berdasarkan No.Invoice 1232/WTT/INV/IX/2020 dengan deskripsi layanan *Penayangan Iklan Layanan Masyarakat "Gerakan Bersama Melawan Covid-19: 3M* edisi 24 September-23 Oktober 2020 dengan durasi 120 detik.

Hal tersebut menjadi sebuah indikasi adanya peran media televisi Radar Tasikmalaya sebagai infrastruktur politik terhadap implementasi kebijakan pemerintah dalam hal penanganan *Covid-19* melalui Dinas Kesehatan dengan penayangan iklan tersebut. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam bagaimana peran Radar Tv tasikmalaya sebagai infrastruktur politik terhadap implementasi kebijakan pemerintah yang mengatur tentang penanganan penyebaran *Covid-19* khususnya di kota Tasikmalaya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peran media televisi Radar Tasikmalaya sebagai infrastruktur politik terhadap implementasi kebijakan pemerintah tentang protokol kesehatan di era pandemi *Covid-19* kepada masyarakat Kota Tasikmalaya?
2. Apakah peran media televisi Radar Televisi dapat membantu dalam menyampaikan gerakan informasi kepada masyarakat Kota Tasikmalaya?

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini agar tidak mengalami kerancuan terhadap esensi penelitian dan mendapatkan hasil yang terfokus, maka penelitian ini akan dibatasi dengan menjelaskan peran media Radar Tv Tasikmalaya sebagai infrastruktur politik terhadap implementasi kebijakan pemerintah Kota Tasikmalaya atas penanganan penyebaran virus *Covid-19*.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang di rumuskan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran media televisi Radar Tasikmalaya sebagai infrastruktur politik terhadap implementasi kebijakan pemerintah tentang protokol kesehatan di era pandemi *Covid-19* kepada masyarakat Kota Tasikmalaya.

E. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan pengetahuan bagi pembaca khususnya penulis tentang bagaimana peran media televisi Radar Tasikmalaya sebagai infrastruktur politik terhadap implementasi kebijakan pemerintah tentang protokol kesehatan di era pandemi *Covid-19* kepada masyarakat Kota Tasikmalaya.
2. Secara praktis, dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis dan pembaca seperti pemerintahan, mahasiswa, para jurnalis dan juga masyarakat untuk pengalaman penelitian dengan memperkaya sudut pandang tentang komunikasi politik.